



CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia.

CSIS Commentaries DMRU-088-ID

8 Juli 2020

Menakar Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah

Diding Sakri

Wakil Ketua Bidang Investasi dan Pembiayaan Pembangunan, Ikatan Ahli Perencanaan

Latar Belakang

Kurang lebih seratus tiga puluh hari telah berlalu sejak kasus resmi pertama COVID-19 di Indonesia hingga saat tulisan ini dimuat (30 Juni 2020). Mengingat COVID-19 belum berlalu hingga sekarang, muncul pertanyaan yang harus dijawab: apa dan bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, baik secara nasional maupun sub-nasional. Upaya untuk menjawab pertanyaan ini telah dilakukan oleh berbagai pihak baik untuk memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian secara nasional maupun pada tingkat sub-nasional.

Analisis pada tingkat nasional misalnya dilakukan oleh Yusuf (2020). Dengan menggunakan model CGE (*computable general equilibrium*) Yusuf menyimulasikan tiga skenario (intervensi minimal terhadap COVID-19, PSBB/intervensi kuat, dan PSBB disertai stimulus fiskal) dan perkiraan masing-masing dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil simulasi menemukan bahwa dalam skenario mana pun, ekonomi nasional akan mengalami penurunan terhadap *baseline* (kondisi seandainya tidak ada

pandemi COVID-19) dengan angka penurunan beragam, yakni dari minus 0,11 hingga minus 4, 21 *percentage point* (persentase selisih dari *baseline*). Lebih lanjut, simulasi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang (satu dekade ke depan), pertumbuhan ekonomi akan lebih tertekan kalau skenario yang dipilih adalah intervensi minimal. Sejalan dengan itu, perhitungan mengindikasikan bahwa kerugian ekonomi dari strategi intervensi kuat (PSBB) jauh lebih rendah daripada kerugian ekonomi skenario intervensi minimal, dan tentu saja PSBB yang disertai dengan stimulus fiskal adalah skenario terbaik menurut simulasi dan perhitungan tersebut.

Contoh lain analisis pada tingkat nasional dengan metode yang berbeda yakni analisis regresi dampak kontraksi ekonomi terhadap angka kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma (2020). Diperkirakan angka kemiskinan yang tadinya pada kisaran 9,2 persen (September 2019) akan menjadi 9,7 persen pada akhir 2020. Ini setara dengan munculnya orang miskin baru sejumlah 1,3 juta jiwa. Bahkan, dalam skenario terburuk, kemiskinan meningkat menjadi 12,4 % setara dengan 8.5 juta jiwa orang miskin baru.

Analisis pada tingkat sub-nasional misalnya dilakukan oleh Damuri, Aswicahyono, dan Lestari (2020) dengan menggunakan apa yang mereka sebut sebagai indikator cepat (relatif terhadap data makroekonomi standar semacam PDRB yang *time lagging*-nya bisa mencapai setahun) sebagai *proxies* terhadap indikator ekonomi yakni data pergerakan pengguna Facebook yang terekam dalam *Facebook range map*. Mobilitas diasumsikan sebagai *proxy* yang baik karena ia merupakan bagian sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang menunjukkan pergerakan ke pusat aktivitas, pergerakan barang, serta kegiatan berbelanja. Diasumsikan bahwa semakin tinggi mobilitas, semakin tinggi pula aktivitas ekonomi.

Analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dilakukan dengan cara membangun indeks komposit yang menunjukkan tingkat keparahan kesehatan di satu sisi dan kinerja ekonomi di sisi lain. Sebagai hasilnya, 34 provinsi di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat kuadran: 1) kesehatan membaik dan ekonomi membaik, 2) kesehatan membaik dan ekonomi memburuk, 3) kesehatan memburuk dan ekonomi membaik, dan 4) kesehatan memburuk dan ekonomi memburuk. Dua *timeline* yang digunakan adalah tanggal 4 Juni (*baseline*) dan 29 Juni (*endline*); kondisi membaik atau memburuk dilakukan dengan membandingkan keadaan pada dua *timeline* tersebut.

Dengan telah adanya hasil kajian terdahulu sebagaimana dibahas di atas, maka tulisan ini mencoba melengkapi dengan fokus pada tingkat sub-nasional yakni provinsi. Untuk melakukan hal tersebut, dikemukakan tiga pertanyaan yang saling berkaitan: 1) sudah seberapa luas dan bagaimana tren persebaran COVID-19 di tiap provinsi di Indonesia? 2) bagaimana perkiraan dampaknya terhadap ekonomi provinsi? dan 3) apa kebijakan ekonomi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pandemi di tiap provinsi tersebut?

Tulisan ini akan mencoba menyajikan jawaban yang bersifat deskriptif dengan semaksimal mungkin memanfaatkan data pada tingkat provinsi. Ketiga pertanyaan tersebut akan dijawab satu persatu secara berurutan kemudian tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan oleh *stakeholders* khususnya pemerintahan di daerah.

Sebaran dan Tren COVID-19 di Indonesia

Peta 1.1 menunjukkan peta persebaran COVID-19 di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data terbaru yang diolah dari KawalCovid19¹ hingga tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan peta tersebut,

¹ Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim KawalCovid19, khususnya Khairul dan Satrio (Oni) yang telah memberikan akses kepada data time series covid19 per provinsi, hingga tanggal 30 Juni 2020.

COVID-19 telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan kumulatif kasus terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur (12.136 kasus), DKI Jakarta (11.424) dan Sulawesi Selatan (5.084), sedangkan paling sedikit di Provinsi Aceh (80), NTT (113), dan Sulawesi Barat (115). Selain angka kumulatif kasus terinfeksi virus korona, diperlukan juga data *time series* yang menunjukkan data perubahan harian kasus sembuh dan kasus terinfeksi (hingga 30 Juni 2020). Data tersebut disajikan dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.1. Peta Persebaran dan Jumlah Kasus Terinfeksi Covid19 per Provinsi



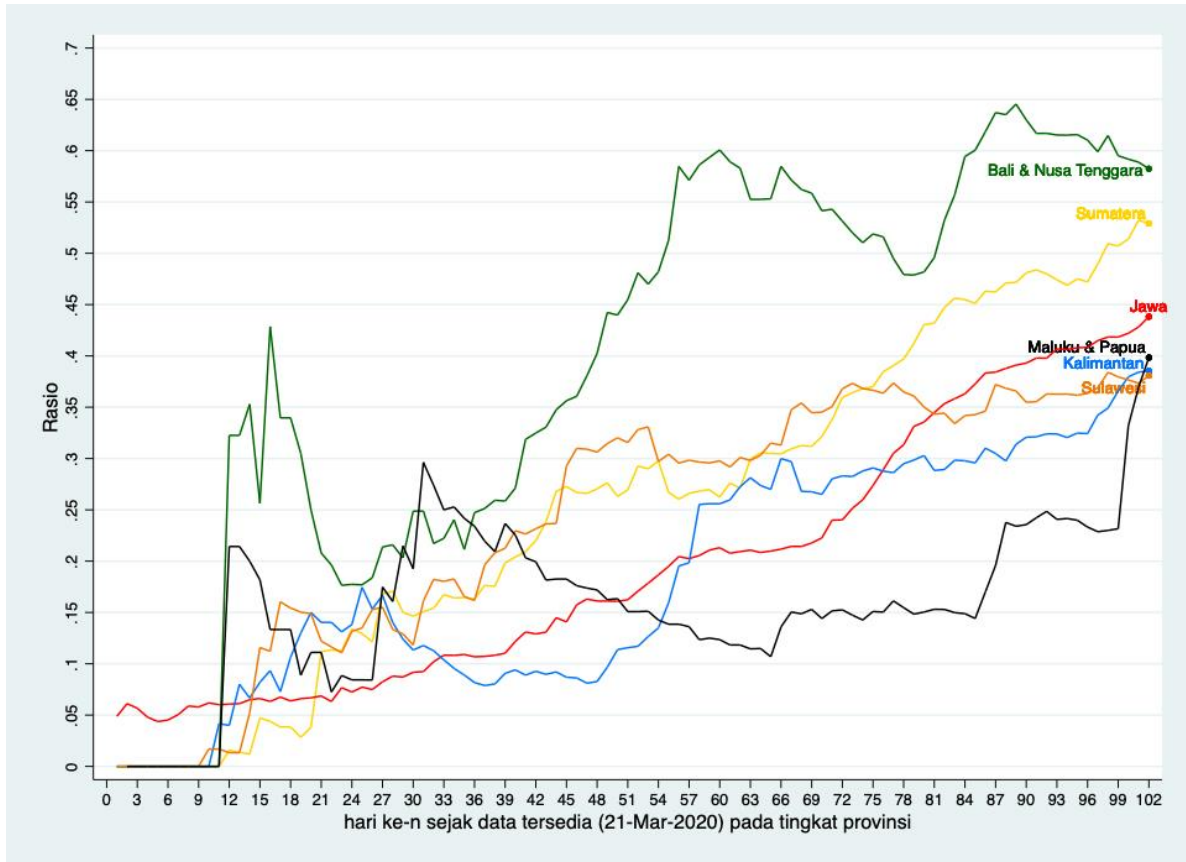
Keterangan: Gambar diolah penulis dengan data bersumber dari KawalCovid19, per 30 Juni 2020

Untuk kemudahan presentasi, Gambar 1.2 menampilkan rasio harian kasus sembuh terhadap kasus terinfeksi pada tingkat pulau. Angka-angka pada provinsi dijumlahkan pada kelompok pulau masing-masing. Pemilihan indikator rasio harian kasus sembuh terhadap kasus terinfeksi memberikan keuntungan, yakni kita dapat memperoleh informasi sekaligus mengenai dua tren yakni pertumbuhan jumlah kasus terinfeksi itu sendiri dan pertumbuhan jumlah kasus sembuh, hanya dengan melalui satu grafik. Interpretasinya cukup sederhana yakni, semakin tinggi nilai sumbu y (rasio) maka kondisi pandemi membaik karena lebih banyak orang sembuh daripada yang terinfeksi.

Selama 102 hari pemantauan, ternyata secara umum terdapat optimisme yakni rasio di semua pulau terus meningkat menuju angka satu. Namun harus tetap waspada karena rasio masih di bawah 1, yang artinya penambahan kasus terinfeksi lebih besar daripada kasus sembuh. Adapun tren yang cukup mengkhawatirkan terjadi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di mana justru rasio terus menurun dalam 20 hari terakhir.

Fakta yang disajikan pada kedua gambar tersebut adalah adanya sebaran yang telah menjangkau semua provinsi dan tren kasus infeksi yang masih lebih besar daripada kasus sembuh. Hal ini membuat kita harus makin waspada baik terhadap potensi penularan virus korona ini maupun terhadap dampak ekonomi yang disebabkan olehnya. Hal tersebut akan dibahas pada bagian berikut ini.

Gambar 1.2. Rasio Kasus Sembuh Terhadap Kasus Terinfeksi, 21-Mar-2020 hingga 30-June-2020



Keterangan: Grafik dibuat oleh penulis berdasarkan data dari KawalCovid19

Dampak Ekonomi COVID-19

Model dan asumsi dasar

Analisis deskriptif mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian provinsi di Indonesia didasarkan pada model sederhana dengan beberapa asumsi yang menyertainya. Model sederhana ini mengandaikan bahwa tingkat keparahan dampak COVID-19 terhadap ekonomi provinsi (I) ditentukan oleh empat faktor yang simultan bekerja di provinsi tersebut yakni tingkat pandemik COVID-19 di provinsi tersebut (C), faktor risiko bencana alamnya (D), faktor permasalahan ekonominya (E), kemudian beban tekanan fiskal provinsi tersebut (F). Semakin besar C , D , E , dan F , akan semakin besar pula I .

Tingkat pandemik COVID-19 (C) diukur dengan modifikasi dari variabel yang telah digunakan pada Gambar 1.2, yakni rasio kasus sembuh terhadap rasio kasus terinfeksi, yang kita sebut variabel r . Modifikasinya adalah r dihitung pada tingkat provinsi bukan pada kluster pulau sebagaimana dalam Gambar 1.2. Selain itu, karena adanya variasi nilai r dari waktu ke waktu, maka nilai r yang digunakan adalah r rata-rata dari dua bulan (sepanjang Mei dan Juni) atau 61 hari pengamatan terakhir. Memilih satu titik observasi saja tidak tepat karena tidak mencerminkan realitas r yang dinamis. Adapun periode dua bulan terakhir pengamatan dipilih karena pada awal pandemi diasumsikan sistem pelayanan

kesehatan belum siap untuk menghadapi pandemi COVID-19 sedangkan pada dua bulan terakhir sudah bekerja semestinya sehingga nilai r pada periode tersebut relatif mencerminkan kemampuan nyata sistem kesehatan. Modifikasi terakhir adalah mengubah r menjadi $1-r$ untuk memudahkan interpretasi, yakni semakin besar nilai $1-r$ maka semakin besar pula tingkat pandemik (C) yang dirasakan suatu provinsi. Semakin tinggi C semakin tinggi pula I (dampak ekonomi COVID-19 di suatu provinsi).

Faktor risiko bencana alam (D) merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap kemampuan suatu wilayah terhadap tekanan. Bayangkan jika suatu daerah mengalami bencana alam pada saat yang bersamaan dengan pandemi COVID-19 ini, maka tekanan akan menjadi berlipat ganda.

Dengan demikian dalam model ini, semakin suatu daerah memiliki faktor risiko bencana yang tinggi, maka semakin tinggi pula dampak ekonomi yang akan dialaminya. Dalam tulisan ini, faktor risiko bencana diukur dengan data terbaru yang dikumpulkan dalam survei PODES 2019 tepatnya pada pertanyaan nomor 1001². Dengan demikian (lihat footnote 2), faktor D adalah vektor yang terdiri dari 10 variabel biner (a-j) yang diperoleh dari PODES 2019.

Faktor permasalahan ekonomi (E) dalam tulisan ini meliputi 2 variabel yakni tingkat kemiskinan (p) dan pengangguran (u). Semakin tinggi tingkat kemiskinan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 maka akan semakin berat dampak ekonomi COVID-19 di provinsi tersebut. Karena secara bersamaan jumlah penduduk miskin akan bertambah dengan adanya miskin baru. Logika yang sama berlaku untuk variabel angka pengangguran (u).

Faktor tekanan fiskal (F) diukur dengan PADPC (pendapatan asli daerah per kapita) yang dalam tulisan ini didefinisikan sebagai total PAD dari tiga level pemerintahan yakni provinsi, kabupaten, dan desa (PADes/pendapatan asli desa) kemudian dibagi dengan jumlah penduduk provinsi. PAD per kapita menunjukkan kemampuan daerah untuk menggunakan sumber daya anggarannya untuk mengatasi COVID-19, misalnya untuk memberikan bantuan keuangan dan subsidi kepada masyarakat. PADPC dipilih sebagai indikator karena ia menunjukkan kemampuan relatif keuangan masing-masing daerah independen terhadap transfer keuangan dari pusat.

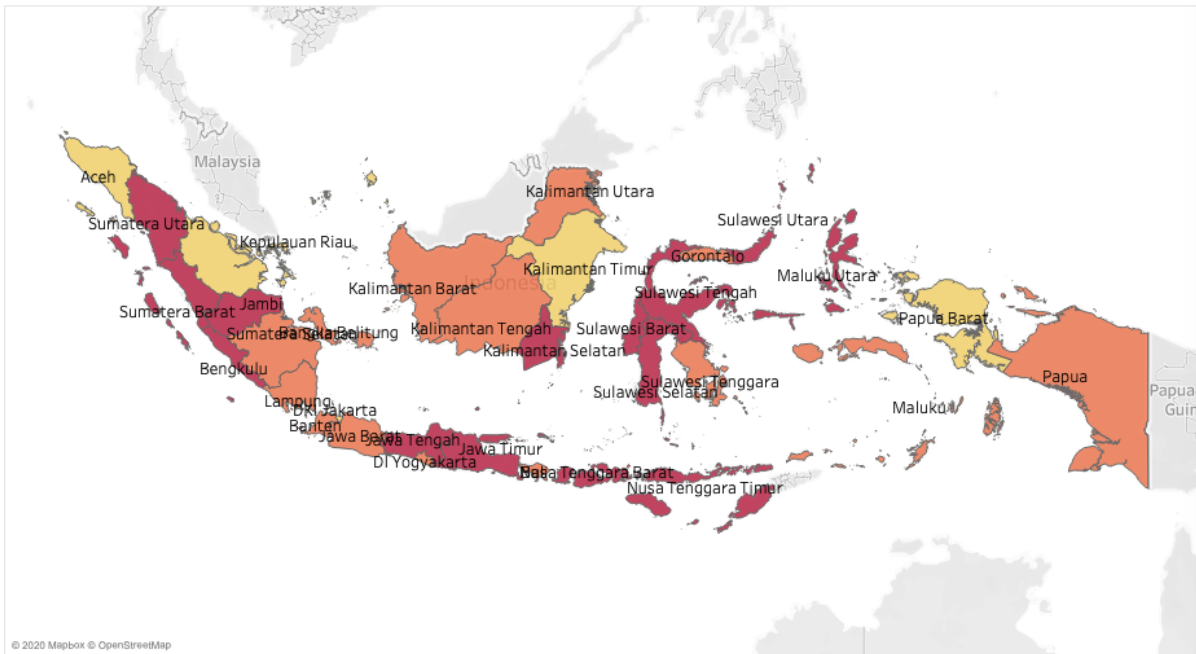
Berbeda dengan variabel lain yang telah dibahas sebelumnya, semakin besar nilai variabel PADPC maka semakin bagus untuk daerah untuk mengurangi beban ekonomi akibat COVID-19. Oleh karena itu, untuk variabel ini, digunakan ukuran $1/\log(\text{PADPC})$ sehingga karakteristik nilainya sama dengan variabel lain yakni semakin besar $1/\log(\text{PADPC})$ semakin berat tekanan fiskal dan pada gilirannya semakin berat dampak ekonomi akibat COVID-19 di daerah tersebut (I).

Hasil perhitungan komponen penyusun indeks komposit dampak ekonomi COVID-19 (I)

Perhitungan indeks komposit dalam tulisan ini adalah perhitungan iterasi pertama tanpa pembobotan atau semua variabel dianggap memiliki bobot yang sama. Tentunya ini simplifikasi lainnya dari model dan hasil perhitungan yang ditampilkan dalam tulisan ini. Pada iterasi selanjutnya model dan pembobotannya perlu untuk diverifikasi lebih lanjut. Dengan catatan mengenai keterbatasan model dan proses penghitungan indeks komposit tersebut, hasilnya ditampilkan dalam Gambar 1.3.

² Pertanyaan nomor 1001 pada PODES 2019 adalah sbb: “Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 (Januari sampai April)”. Terdapat a-j jenis bencana yang dienumerasi dalam PODES yakni: a. Tanah longsor, b. Banjir, c. Banjir bandang, d. Gempa bumi, e. Tsunami, f. Gelombang pasang laut, g. Angin puyuh/puting beliung/ topan, h. Gunung Meletus, i. Kebakaran hutan dan lahan, j. Kekeringan (lahan).

Gambar 1.3. Peta Indeks Keparahan Dampak Ekonomi COVID-19 ($I=f(C,D,E,F)$)



Keterangan: Peta dibuat oleh penulis berdasarkan data yang diolah dari KawalCovid19

Dalam Gambar 1.3 terlihat bahwa ada tiga klasifikasi tingkat keparahan ekonomi akibat COVID-19 yang diperkirakan dapat dialami daerah, dengan warna semakin gelap (merah) menunjukkan kondisi terparah. Presentasi dalam Gambar 1.3 memiliki interpretasi yang sederhana yakni bahwa provinsi yang memiliki nilai-nilai besar dalam variabel-variabel C (indeks keparahan COVID-19 yakni rasio kesembuhan terhadap angka infeksi), D (indeks kebencanaan yang berpotensi memperparah kondisi perekonomian), E (indeks permasalahan ekonomi yakni kemiskinan dan pengangguran), dan indeks beban fiskal (yakni inversi dari pendapatan asli daerah per kapita) adalah provinsi yang diduga mengalami dampak ekonomi terparah dari COVID-19.

Pertanyaan selanjutnya dari analisis deskriptif tersebut adalah: apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak tersebut. Hal tersebut akan dibahas pada bagian berikut ini.

Kerangka Kebijakan yang Mungkin Dilakukan Daerah

Keterbatasan analisis deskriptif dan analisis berbasis data standar ekonomi

Analisis deskriptif yang dilakukan di bagian 3 tidak memungkinkan untuk secara sah menghasilkan preskripsi kebijakan yang konkret dapat dilakukan daerah. Bahkan analisis ekonometri dan *computable general equilibrium* (CGE) juga memiliki keterbatasan dalam hal kebaruan data yang digunakan dan levelnya yang masih agregat nasional atau paling detail provinsi. Data makroekonomi (seperti PDB dan PDRB) serta data survei pada tingkat rumah tangga (seperti Susenas dan Sakernas) memiliki senjang waktu yang cukup panjang, antara pengumpulan data hingga data siap digunakan.

Namun demikian, kerangka umum kebijakan masih mungkin untuk didiskusikan dengan mempertimbangkan hasil analisis deskriptif tersebut disertai hasil kajian lain yang relevan seperti didiskusikan pada bagian 4.3. Sebelumnya pada bagian berikut (4.2) akan dijelaskan contoh data ideal sebagai informasi bagi pembaca khususnya pemerintahan jika hendak melakukan upaya lebih baik mengukur dampak COVID-19.

Ideal and nearly ideal data untuk mengukur dampak COVID-19

Idealnya, kebijakan untuk mengatasi kejadian luar biasa dan cepat seperti COVID-19 terhadap perekonomian dibuat dengan mendasarkan diri kepada *rapid assessment* atau bahkan *real time assessment* agar diketahui keadaan ekonomi sebenarnya yang sedang terjadi selama pandemi. Contoh *real time assessment* adalah apa yang dilakukan oleh (Chetty, Friedman, Hendren, & Stepner, 2020) di USA dengan *assessment* pada tingkat individu, rumah tangga, dan sektor usaha, dengan karakteristik data yang memenuhi kaidah *big data* (*sample size* besar, frekuensi observasi yang tinggi, dan variasi informasi yang dikumpulkan) sehingga selain representasi pada skala makro/nasional juga representatif hingga skala lokal. Bahkan data yang mereka kumpulkan dan olah dapat dianalisis hingga kedetailan *zip code area*. Kira-kira setara dengan sebuah wilayah kecamatan kalau di Indonesia.

Dengan menggunakan *big data* yang dikumpulkan oleh perusahaan pemroses transaksi kartu kredit, pembayaran gaji karyawan perusahaan, perusahaan jasa keuangan, dan perusahaan jasa rekrutmen tenaga kerja, Chetty dkk membangun *real time statistics* yang antara lain meliputi tingkat konsumsi masyarakat selama pandemi, tingkat pengangguran, dan pendapatan perusahaan. Data tersebut beserta hasil analisisnya bahkan dapat diakses oleh publik hanya selang seminggu dari proses pengumpulannya.³ Penelusuran semacam ini antara lain memperoleh temuan tentang seberapa efektif kebijakan antisipasi dampak COVID-19 (misalnya bantuan keuangan kepada rumah tangga dan pinjaman ringan kepada UKM) yang sedang dilakukan di USA dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki.

Saat ini, sepengetahuan penulis, belum ada hal serupa (*real time assessment*) di Indonesia yang dapat digunakan untuk tulisan ini.⁴ Namun demikian ada data *second best* yang dapat digunakan, yakni *rapid assessment* seperti yang dilakukan oleh JPAL (Jameel Poverty Action Lab) bekerja sama dengan Universitas Indonesia, didukung oleh pemerintah Australia dan secara rutin disampaikan sebagai *input* kepada pemerintah (misalnya melalui Bappenas).

Pada dasarnya *assessment* ini mencoba melakukan Susenas (survei sosial ekonomi nasional) dan Sakernas (survei tenaga kerja nasional) secara *online* dengan *sampling framework* mengikuti Susenas. Hal ini karena Susenas yang biasa dilakukan pada Maret dan September setiap tahunnya, dan Sakernas (tiap Februari dan Agustus) belum dapat digunakan untuk memotret dampak ekonomi COVID-19. Untuk itu, sebagai *input* kedua dalam merumuskan kerangka kebijakan daerah untuk penanggulangan dampak ekonomi COVID-19, tulisan ini akan meminjam data hasil survei *online* JPAL-UI tersebut.

³ Untuk yang tertarik membaca lebih detail tentang *real time tracking* silakan mengunduh paper Chetty et.al, 2020 pada tautan berikut https://opportunityinsights.org/wp-content/uploads/2020/05/tracker_paper.pdf. Adapun yang tertarik membaca datanya, ada pada tautan berikut <https://tracktherecovery.org/>.

⁴ Di Indonesia hal seperti yang dilakukan Chetty dkk sudah mulai coba dilakukan walaupun belum sepenuhnya ideal melakukan *real-time tracking* pada indikator ekonomi secara langsung. Misalnya BPS menerbitkan laporan analisis big data berikut ini: <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/01/effd7bb05be2884fa460f160/tinjauan-big-data-terhadap-dampak-covid-19-2020.html>. Empat sumber big data yang digunakan dapat dikatakan tidak langsung terkait indikator ekonomi seperti dalam Chetty dkk, melainkan *proxies* dengan indikator: mobility (<https://www.google.com/covid19/mobility/>), polusi udara/air *quality index* (<https://www.iqair.com/>), penerbangan (<https://www.flightstats.com/v2/flight-tracker/search>), dan volume transaksi di *online market place*.

Kutipan hasil rapid assessment JPAL-UI sebagai input tambahan untuk diskusi kebijakan

Survei *online* JPAL dan UI menggunakan kondisi pada akhir Februari 2020 sebagai patokan (*baseline*), yakni keadaan sebelum pandemi dinyatakan terjadi di Indonesia (1 Maret 2020). Ada beberapa temuan yang bisa dikutip untuk tulisan ini. Pertama dalam isu pengangguran. Sebanyak 56 persen responden pada minggu ke delapan survei tersebut dilakukan (18 Mei 2020) melaporkan tidak bekerja padahal sebelumnya (akhir Februari 2020) mereka masih bekerja. Kondisi ini dapat diartikan sebagai *proxy* terhadap kasus kehilangan pekerjaan. Kejadian ini berlaku baik di perkotaan maupun perdesaan, dialami pria maupun wanita, di Jawa dan luar Jawa, di semua sektor pekerjaan, serta dialami oleh responden dengan beragam tingkat pendidikan. Keadaan ini terus meningkat dari survei minggu pertama (minggu terakhir Maret 2020) hingga survei minggu ke delapan. Artinya, semakin lama pandemi berlangsung semakin luas dan dalam dampaknya terhadap pengangguran.

Isu kedua adalah mengenai berkurangnya akses terhadap pangan (*food insecurity*) yang didefinisikan sebagai berkurangnya frekuensi dan volume makan dibandingkan kondisi normal dikarenakan oleh alasan keuangan (berkurangnya daya beli). Survei menunjukkan bahwa terdapat sekitar 35 persen keluarga responden yang mengalami hal tersebut. Serupa dengan isu pengangguran, kasus *food insecurity* juga terjadi di perkotaan maupun perdesaan, dialami pria maupun wanita, dan di Jawa maupun luar Jawa. Adapun kondisi terparah dialami oleh responden dengan tingkat pendidikan rendah.

Isu yang terakhir adalah perpindahan tempat tinggal yang terjadi selama pandemi. Sebanyak 38 persen responden pria dan 33 persen responden wanita melaporkan berpindah tempat tinggal (migrasi). Migrasi dilaporkan terjadi lebih banyak di dalam kabupaten/kota yang sama, bukan antar kabupaten/kota. Pola seperti ini terjadi baik di Jawa maupun luar Jawa. Kasus ini dialami oleh responden dari berbagai tingkat pendidikan. Namun dari sisi sektor pekerjaan, migrasi lebih banyak dialami oleh mereka yang bekerja di sektor perhotelan.

Kerangka kebijakan

Dalam sudut pandang ekonomi, pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sejak awal 2020 di seluruh negara di dunia ini disebut sebagai peristiwa non-ekonomi yang memiliki efek kejutan terhadap perekonomian. Ekonomi tertekan (*shock*) baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun permintaan (*demand side*). *Supply side* tertekan/berkurang/terhenti karena adanya keawatiran terhadap risiko kesehatan apabila proses produksi barang dan jasa diselenggarakan (pabrik, perkantoran, restoran, hotel, dan lain-lain ditutup). Akibat langsungnya adalah hilangnya pekerjaan masyarakat (muncul pengangguran baru) seperti yang telah digambarkan terekam pada *rapid assessment*, yang pada akhirnya berkurang pula daya beli mereka. Penurunan daya beli bahkan mengakibatkan adanya penurunan konsumsi untuk kebutuhan pokok pangan atau yang disebut *food insecurity* dalam bahasan pada bagian terdahulu. Selanjutnya, bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan atau di lokasi yang sewa perumahan dan biaya hidupnya lebih mahal terpaksa melakukan migrasi sementara seperti juga teridentifikasi dalam *rapid assessment*.

Tulisan singkat ini tidak bisa menyajikan secara persis di provinsi mana peristiwa kehilangan pekerjaan, *food insecurity*, dan migrasi terjadi, karena tidak adanya data representatif untuk itu. Namun demikian ketiga hal tersebut dapat dilihat sebagai faktor simultan yang meningkatkan tekanan ekonomi dampak COVID-19 (I) seperti yang telah dimodelkan pada bagian 3 tulisan ini dan hasilnya disajikan dalam Gambar 1.3.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tulisan ini berangkat dari model sederhana yang mengandaikan bahwa tingkat keparahan dampak COVID-19 terhadap ekonomi provinsi (I) ditentukan oleh empat faktor yang simultan bekerja di provinsi tersebut yakni: yakni tingkat pandemi COVID-19 di provinsi tersebut (C), faktor risiko bencana alamnya (D), faktor karakteristik permasalahan ekonominya (E), dan faktor beban fiskal (F). Meskipun memiliki keterbatasan, diharapkan informasi yang dihasilkan bermanfaat khususnya bagi pemerintahan daerah bahwa skala permasalahan ekonomi akibat COVID-19 akan semakin besar jika pandemi terus berlanjut dan daerah memiliki berbagai permasalahan lain seperti variabel-variabel tersebut. Model sederhana tersebut bahkan dapat dibuat menjadi lebih lengkap dengan variabel lain, misalnya tingkat morbiditas ataupun prevalensi penyakit menular lainnya di provinsi tersebut, dan variabel lain yang relevan.

Untuk dapat lebih akurat mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi yang dapat dilakukan, sebaiknya pemerintahan daerah melakukan pendataan dan penelitian terhadap aspek-aspek perekonomian dengan cara cepat dan tepat, sebagaimana telah dicontohkan dalam referensi yang dirujuk dalam tulisan ini. Mengandalkan data tradisional yang memiliki *time-lagging* yang cukup panjang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kebijakan atau bahkan salah sasaran seperti yang ditemukan dalam beberapa kasus selama masa pandemi ini.

Dalam waktu dekat, tulisan ini juga dapat di-*update* dengan informasi dan data baru misalnya mengenai tekanan fiskal yang dipastikan makin tinggi pada tahun 2020 ini karena adanya penerimaan (*revenue streams*) yang berkurang. Data PAD per kapita yang digunakan sebagai komponen penyusun indeks beban fiskal (F) pada tulisan ini menggunakan data realisasi penerimaan pada tahun 2018, yang tentu saja tidak mencerminkan kondisi tekanan fiskal saat ini. *Updating* data dan reiterasi model perlu terus dilakukan termasuk dengan memasukkan potensi-potensi daerah yang dapat mengurangi dampak ekonomi COVID-19. Misalnya potensi swadaya dan *crowdfunding* yang banyak dilakukan komunitas yang mungkin datanya bisa diakses pada beberapa waktu ke depan.

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160

Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (62-21) 384 7517 | csis.or.id

COVID-19 Commentaries Editors

Philips J. Vermonte, Shafiah Mubibat, Vidhyandika Perkasa, Yose Rizal Damuri, Beltsazar Krisetya

Daftar Bacaan

Chetty, R., Friedman, J. N., Hendren, N., & Stepner, M. (2020). *How Did COVID-19 and Stabilization Policies Affect Spending and Employment? A New Real-Time Economic Tracker Based on Private Sector Data*.

Damuri, Y. R., AswicaHyono, H., & Lestari, D. A. W. (2020). Evaluasi Kegiatan Ekonomi dan Intensitas Penyebaran COVID-19 di Masa New- Normal: Tinjauan atas Beberapa Indikator Cepat [Pembaruan Data 29 Juni 2020. Lihat: <https://csis.or.id/publications/evaluasi-kegiatan-ekonomi-dan-intensitas-penyebaran-covid-19-di-masa-new-normal-tinjauan-atas-beberapa-indikator-cepat>

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (draft)* (SMERU Working Paper). *SMERU Working Paper* (Vol. April). Jakarta. Retrieved from <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>

Yusuf, A. A. (2020). Mengukur Ongkos Ekonomi “Sesungguhnya” Dari Pandemi Covid-19. *Perspektif 2030*. Bandung: SDGs Center Unpad. Retrieved from <http://sdgcenter.unpad.ac.id/mengukur-ongkos-ekonomi-sesungguhnya-dari-wabah-covid-19/>

Rema Hanna and Ben Olken (April 2020). *Online survey on economic impact of Covid-19 in Indonesia*. J-PAL Southeast Asia.